



JURNAL STUDI GENDER INDONESIA

**Partisipasi Kaum Perempuan
dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**
J. Herman S.

**Respon Komunitas Madrasah terhadap
Upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan**
(Sebuah Kajian dalam Perspektif Strategi Komunikasi)-
Lilik Hamidah

Gerakan Kesetaraan Gender
(Upaya Mengurangi Kesenjangan Pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan)
Muflikhatul Khoiroh

Mengurai Problem Perlindungan Anak
(Analisis Kebijakan Negara dan Solusi Alternatif Pendidikan)
Akh. Muzakki

Jihad Gender dalam Perspektif Insider
(Studi Pemikiran Amina Wadud dalam Inside The Gender Jihad)
Ghozi

**Perlindungan Peserta Didik dan Profesi Guru dalam Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah
di Kabupaten Ponorogo**
Ridho Rokamah

Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura
(Studi Kasus tentang Faktor Penyebab dan Pengaruh Kawin Sirri terhadap Hubungan Keluarga
di Desa Buminyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan)
Hollah

REVIEW BUKU

Analisa Pemikiran Fiqih Feminis Berperspektif Keadilan Gender di Indonesia
Ramlani Lina Sinaulan

Diterbitkan Oleh:
Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya

Jurnal SGI

Vol. 02

No. 02

Hlm.
103-199

Surabaya,
November 2011

ISSN:
2087-9830



JURNAL STUDI GENDER INDONESIA
PUSAT STUDI GENDER IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Jurnal Studi Gender Indonesia (JSGI) adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh PSG IAIN Sunan Ampel Surabaya. JSGI terbit dua kali dalam setahun, bulan Agustus dan bulan November. Ranah kajian JSGI meliputi persoalan gender di Indonesia dan gender berkaitan dengan Islam. Kajian gender di Indonesia bisa merupakan pembahasan tentang isu gender yang terjadi di Indonesia atau dilihat dari perspektif ke Indonesia.

JSGI mengundang berbagai kalangan (akademisi, agamawan, intelektual, dan mahasiswa) untuk berpartisipasi dalam bentuk tulisan. Naskah dapat dikirim dalam bentuk soft copy dengan menggunakan microsoft word melalui email psg_iainsupel@yahoo.com, elham73iain@yahoo.com, naily_iain@yahoo.co.id atau diserahkan langsung ke kantor redaksi Jurnal Studi Gender Indonesia (JSGI). Gedung Laboratorium Komputer IAIN Sunan Ampel Lt 1 Jl. A. Yani 117 Surabaya.



JURNAL STUDI GENDER INDONESIA
PUSAT STUDI GENDER IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Vol. 02, No. 02, November 2011
ISSN 1978-3183

Redaksi Ahli

Nur Syam (IAIN Sunan Ampel Surabaya)
Abd A'la (IAIN Sunan Ampel Surabaya)
Amrih Widodo (Australian National University)
Marzuki Wahid (ISIF Cirebon)
Pinky Saptandari (Universitas Airlangga Surabaya)
Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Siti Musda Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penanggung jawab
Lilik Hamidah

Pimpinan Redaksi
Nabiela Nailly

Editor
Muflikhatul Khoiroh
Syafi'i
Abd. Muhid
Rochimah
Muzaiyanah
Nur Mazidah

Staff Administrasi
Ana Bilqis fajarwati

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel. Jl. A.Yani
117 Tropol Pos 47/WO Surabaya 60237. (Tlp. (031) 8410298, Fax. (031) 8413300. Email
PSG : psg_iainsupel@yahoo.com, elham73iain@yahoo.com, naily_jain@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

- 103 - 110 **Partisipasi Kaum Perempuan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**
J. Herman S.
- 111 - 125 **Respon Komunitas Madrasah terhadap Upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan**
(Sebuah Kajian dalam Perspektif Strategi Komunikasi)
Lilik Hamidah
- 126 - 135 **Gerakan Kesetaraan Gender**
(Upaya Mengurangi Kesenjangan Pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan)
Muflikhatul Khoiroh
- 136 - 149 **Mengurai Problem Perlindungan Anak**
(Analisis Kebijakan Negara dan Solusi Alternatif Pendidikan)
Akb. Muzakki
- 150 - 156 **Jihad Gender dalam Perspektif Insider**
(Studi Pemikiran Amina Wadud dalam Inside The Gender Jihad)
Gbozi
- 157 - 167 **Perlindungan Peserta Didik dan Profesi Guru dalam Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah di Kabupaten Ponorogo**
Ridho Rokamah
- 168 - 193 **Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura**
(Studi Kasus tentang Faktor Penyebab dan Pengaruh Kawin Sirri terhadap Hubungan Keluarga di Desa Buminyar, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan)
Holilah
- 194 - 199 **Review Buku**
Analisa Pemikiran Fiqih Feminis Berperspektif Keadilan Gender di Indonesia
Ramlani Lina Sinanlan

GERAKAN KESETARAAN GENDER: UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN PENDAPATAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Muflikhatul Khoiroh

Staf pengajar Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

This paper tries to answer question whether the gender equality activism and movement can really reduce the gap between male and female in their financial income?" In analyzing this problem, the writer employs two sociological theories; functional and conflict. Within the functional theory, society is composed from the interconnecting and interdependent elements, male and female, that try to seek equilibrium. On the other hand, conflict theory assumes that male and female are groups with each interest and, through the conflict, the dynamics of changing position between them may occur. Seemingly, even though gender movement has been there for a relatively long time, gender gap and injustice are still easily seen. Using conflict theory, gap in income is another type of social stratification. Women, in general, tend to have lower position compared to men in the same condition and qualification. Within society, wealth is main source of social status that a man can gain prestige easily. The reality shows that since the man earn more than woman and contribute more to the family, they gain more higher status than the woman in the society. In return, the higher the woman earn and contribute economically, the gap is supposed to be reduced. In industrial era, more women enter the workforce. However, due to several factors namely lack of education, poor experience, and woman's double burden, their salary continues to be lower than men in general and the gap in income between male and female continues. Data shows that from 44% women in the workforce, less than 5% are the senior executives; and from 71% class teachers, only 2% are the head of schools. This comparison shows that the gap in income and status within the workforce continues to happen up to now.

Keywords: Kesenjangan, ketimpangan, pendapatan, gender

Pendahuluan

Dalam perspektif sejarah gerakan kemanusiaan, gerakan perempuan untuk memperoleh status yang berkeadilan merupakan perjuangan tersulit dan terlama yang berbeda dengan perjuangan kemerdekaan atau rasial. Musuh perempuan seringkali tidak berbentuk realitas fisik yang bersembunyi dalam kamar-kamar pribadi, tetapi dalam konsep-konsep yang menyertai kehidupan perempuan itu sendiri.

Awal gerakan perempuan di dunia itu tercatat mulai tahun 1800-an (abad 19), dan ini diawali dengan kesadaran kaum perempuan atas ketertinggalannya dengan kaum laki-laki yang disebabkan oleh banyaknya perempuan yang buta huruf, miskin, bodoh, dan tidak memiliki keahlian/*skill*. Gerakan yang berlangsung sangat lama itu di tengah jalan mengalami perubahan paradigma. Yang pertama lebih memusatkan perhatiannya pada "masalah perempuan", dan yang kedua lebih menitikberatkan terhadap sistem dan struktur masyarakat yang dilandaskan kepada analisis "hubungan gender".

Sebagai sebuah gerakan sosial (*social movement*)¹, gerakan *gender* bertujuan agar tercipta

¹ DiRenzo mendefinisikan gerakan sosial sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu untuk menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik. DiRenzo menegaskan bahwa perubahan sosial yang menjadi tujuan akhir dari suatu gerakan sosial tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku individu melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik.

social change (perubahan sosial), hubungan/relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan cara memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama. Secara sepintas, perjuangan *gender* seakan-akan telah mencapai apa yang dicitakan-citakan. Namun, jika dicermati secara seksama, perjuangan yang hampir melintasi dua abad itu masih kurang memuaskan. Apalagi, jika dikaitkan dengan persoalan ekonomi dan politik. Sebagai contoh, adanya pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin yang membuat pekerjaan yang dilakukan perempuan menjadi sebagai pekerjaan sekunder. Pandangan demikian berpengaruh pada upah/gaji perempuan. Perempuan, di sini, identik dengan pekerja berupah murahan atau rendahan. Dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki itu, perempuan selalu menjadi individu yang ter subordinasi dan termarginalisasi.

Gerakan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa awal gerakan perempuan ini tercatat sejak tahun 1800-an yang diawali dengan kesadaran perempuan atas ketertinggalannya yang disebabkan oleh banyaknya perempuan yang buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian/skill. Upaya gerakan perempuan awal ini ditempuh dengan cara mengedepankan perubahan sistem sosial, yaitu dengan gerakan sosial melalui turun jalan dalam rangka memperjuangkan hak-hak untuk diperbolehkan “ikut memilih” dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain adalah Marry Wollstonecraft (1759-1797), Harriet Taylor (1807-1858), Elizabeth Candy Stanton (1815-1902), dan Susan B. Anthony (1820-1906). (Tim PSW UIN Syarif Hidayatullah dan IISEP: 2003,98)

Gerakan perempuan ini tidak merasa puas begitu saja dengan memperoleh hak pilih dalam pemilu. Mereka selalu kritis dalam melihat kondisi yang ada. Pada era industrialisasi—pada kurun seratus tahun kemudian—perempuan-perempuan kelas menengah mulai menyadari kurangnya peran mereka di tengah masyarakat. Mereka mulai mengetahui dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial yang korbannya adalah para perempuan; juga terdapat persoalan ketidakadilan mulai seumpama upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga dalam bentuk kekerasan.

Gerakan gender yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan gender yang diawali dengan gerakan perempuan ini biasanya dikenal dengan gerakan feminis. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, gerakan feminis terbagi menjadi beberapa aliran. Aliran-aliran tersebut dibedakan berdasarkan paradigma yang digunakan.

Aliran pertama adalah gerakan feminis yang memusatkan perhatian pada “perempuan” yang mengasumsikan, bahwa munculnya permasalahan kaum perempuan itu disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan. Oleh karena itu, haruslah dilakukan upaya taktis guna menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha pendidikan kaum perempuan. Ada beberapa alasan dari upaya “mengejar” ketertinggalan kaum perempuan ini, meskipun semuanya bertumpu di atas paham modernisasi. *Pertama*, adalah pendekatan “pengentasan kemiskinan”, di mana, dasar pemikirannya adalah, bahwa perempuan menjadi miskin adalah karena mereka tidak produktif, sehingga perlu diciptakan “projek peningkatan pendapatan” bagi kaum perempuan. *Kedua* adalah “pendekatan efisiensi”, yaitu suatu pemikiran, bahwa pembangunan itu mengalami kegagalan dikarenakan perempuan tidak

dilibatkan dalam rangka efisiensi “pembangunan”. Analisis seperti ini lebih memusatkan perhatian kepada kaum perempuan, dan kegiatannya semata-mata adalah guna memenuhi kebutuhan praktis perempuan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dicetuskan suatu pendekatan yang dikenal dengan *Women in Development* (WID). (Din Wahid dan Jamhari Makruf editor), 2007; 80)

Aliran kedua yaitu aliran pemikiran yang lebih menitikberatkan perhatian pada hubungan (struktural) *gender*. *Gender* di sini diposisikan sebagai konstruksi sosial yang telah disosialisasikan sejak lahir, dan ternyata menyumbangkan ketidakadilan (*inequalities*). Manifestasi ketidakadilan tersebut tampaknya mempengaruhi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, epistemologi dan metode riset serta evaluasi dan pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan. Oleh karena itu, permasalahannya bukanlah terletak pada “kaum perempuan” saja, tetapi juga dalam ideologi, sistem, dan struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Oleh sebab itu, yang menjadi tujuan kegiatan atau program perempuan itu bukan sekadar menjawab “kebutuhan praktis” atau mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk menentang hegemoni dan melawan diskursus terhadap ideologi gender yang telah mengakar dalam keyakinan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Usaha yang lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender seperti ini dikenal sebagai pendekatan *Gender and Development* (GAD). (Julia Cleves Mosse, 2004; vi-vii)

Pendekatan yang disebut terakhir ini tampaknya masih digunakan sampai saat ini, dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah; apakah gerakan gender dengan pendekatan GAD itu dapat mengurangi kesenjangan *income* antara laki-laki dan perempuan?

Pembagian Kerja berdasarkan Jenis Kelamin

1. Jenis kelamin dan gender

Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan biologis, tetapi juga berbeda dalam konstruk imajinatif, misalnya, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, emosional, tidak asertif, dan cenderung mengalah. Sebaliknya, laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai sosok yang besar, asertif dan dominan. Dikotomi laki-laki dan perempuan juga tercermin dalam pengkotak-kotakan “pekerjaan laki-laki” dan “pekerjaan perempuan” yang dikenal dengan istilah pembagian kerja secara seksual. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak saja ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh faktor sosial dan budaya, dan inilah yang disebut dengan konstruksi *gender*. (editor: Fauzie Ridjal dkk.,1993; 30)

Pada dasarnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sedangkan, perbedaan gender merupakan perbedaan laki-perempuan berdasar konstruksi sosio-kultural. Artinya, gender merupakan interpretasi kultural yang berkaitan dengan peran, sifat, dan tanggungjawab. Pada umumnya, gender berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat.

(Mufidah Ch, 2004; 8-9) Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi “maskulin” dan “feminin”. Gender yang berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan kelaki-lakian; antara perempuan dan keperempuanan. Pada umumnya, jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminine. Akan tetapi, hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut. (editor; Fauzie Ridjal dkk,1993; 31)

2. Perempuan² dalam teori sosiologi

Dalam sosiologi, perempuan—sebagai suatu objek kajian—banyak dan sering diabaikan. Biasanya, perempuan hanya dibahas dalam kaitannya dengan perkawinan dan keluarga. Berbicara tentang perempuan, ada dua teori sosiologi yang banyak memberikan andil dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pertama, teori fungsional, yang menegaskan tatanan “alamiah” berupa dominasi laki-laki sebagai suatu perbedaan terhadap argument mengenai “hak-hak” kaum perempuan. Kedua, teori konflik, yang melukiskan sistem-sistem penindasan yang secara sistematis membatasi kaum perempuan.

Teori fungsional yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson berasumsi atau berkeyakinan, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, dan keluarga) yang masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Interelasi di antara sistem yang ada adalah karena konsensus. Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian berusaha secepatnya menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner yang tidak dapat ditetapkan jangka waktunya. Konflik dalam suatu masyarakat itu dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Artinya, harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik harus dihindarkan. Dengan demikian, *status quo* harus dipertahankan. Teori ini menolak setiap usaha yang akan menggoncang *status quo*, termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mereka melihat, bahwa kondisi yang ada adalah normal dan sehat. Oleh sebab itu, tidak diperlukan perubahan. Jika perubahan adalah suatu hal yang niscaya, maka yang diperlukan adalah perubahan atau reformasi yang terkontrol yang tidak sampai mengganggu stabilitas sosial. Pemikiran aliran fungsional ini termanifestasikan dalam gerakan feminisme liberal. (Mansour Faqih, 1997; 80)

Berkaitan dengan relasi gender, teori fungsionalis berasumsi, bahwa jika semua masyarakat mendorong perbedaan gender, maka perbedaan tersebut harus memiliki beberapa efek positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka menunjukkan bahwa--setidaknya di dalam masyarakat tradisional (masyarakat praindustri)--perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah sangat fungsional. (Ian Robertson, 1988; 318)

Perbedaan peran dalam masyarakat tradisional adalah sangat fungsional, bagaimana

² Penulis lebih suka menggunakan istilah perempuan daripada wanita, karena kata perempuan memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu empu yang merupakan subyek, daripada kata wanita yang memberi kesan sebagai obyek belaka yang dalam analisa kata bahasa Jawa berarti *wani ditoto* (manusia yang siap dan harus taat untuk diatur).

dengan masyarakat industri modern, apakah tetap fungsional? Dua tokoh teori fungsional, Talcott Parsons dan Robert Bales (1954), berpendapat, bahwa dalam keluarga modern tetap membutuhkan dua orang dewasa yang mengkhususkan diri dalam peran-peran tertentu. Peran "instrumental", yang biasanya diambil oleh ayah, berfokus pada hubungan antara keluarga dan dunia luar. Di sini, Sang ayah, misalnya, bertanggung jawab untuk mendapatkan pendapatan yang mendukung keluarga. Peran "ekspresif", yang biasanya diambil oleh ibu, adalah berfokus pada hubungan dalam keluarga. Peran penting kejantanan lelaki mensyaratkan bahwa ia akan dominan dan kompeten, sedangkan peran ekspresif betina mensyaratkan kepasifan. Dengan cara demikian, fungsi keluarga lebih efektif daripada jika perbedaan gender tidak didefinisikan secara jelas. (Ian Robertson, 1988; 318)

Para kritikus teori fungsionalis berpendapat, bahwa teori fungsional cenderung sangat mempertahankan *status quo*. Mereka berpendapat, bahwa peran gender tradisional mungkin telah fungsional dalam masyarakat praindustri, tetapi kurang masuk akal dalam suatu masyarakat modern yang kegiatan sehari-hari laki-laki dan perempuan jauh dari asal usulnya yang sederhana. Dua abad yang lalu, perempuan Amerika rata-rata memiliki harapan hidup sekitar empat puluh lima tahun, dan ia memiliki delapan anak-anak antara umur kedua puluh dan empat puluh tahun. Hari ini, harapan hidup perempuan tujuh puluh delapan tahun, dan perempuan rata-rata memiliki dua anak selama periode lima tahun di dalam dua puluhnya. Peran sejarah yang menjaga perempuan tinggal di rumah tampaknya semakin tidak relevan ketika dia bisa hidup selama setengah abad setelah anak terakhir lahir. Juga, teori fungsionalis mengatakan apa-apa tentang ketegangan yang ditempatkan pada perempuan modern yang ingin memainkan peranan "instrumental", atau pada pria yang lebih suka memainkan peran "ekspresif". Memang, teori tersebut mengabaikan disfungsi kepada masyarakat untuk mencegah setengah populasi dari berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan pandangan aliran fungsionalisme yang lebih senang mempertahankan *status quo* untuk tetap terjadinya keseimbangan, maka usaha untuk mencapai kesetaraan *income* antara laki-laki dan perempuan sangat sulit, kalau tidak boleh dikatakan tidak bisa.

Berbeda dengan teori fungsional, teori konflik percaya, bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan pusat dari setiap hubungan social, termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. (Mansour Faqih, 1997; 84)

Berdasar atas asumsi tersebut, maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan merubah posisi dan hubungan. Dengan demikian, perubahan hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan hanya akan dapat dilihat dari konflik antar dua kepentingan.

Karl Marx melihat masyarakat secara konstan berubah komposisinya. Kekuatan-kekuatan antithesis menyebabkan perubahan-perubahan sosial melalui ketegangan-ketegangan dan perjuangan antar kelas yang bertentangan. (Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 2002; 7). Menurut Marx, hubungan antara suami dan isteri itu serupa dengan hubungan antara proletar dan borjuis. (Mansour Faqih, 1997; 86)

Berkaitan dengan teori konflik, Max Weber memusatkan perhatian pada adanya saling

hubungan antar kelas, status, dan kekuasaan. Menurut Weber, kelas adalah basis ekonomi ketidaksetaraan; kelas “kaya” (*the haves*) dan kelas “miskin” (*the have-nots*). Dimensi berikutnya menurut Weber adalah status sosial, yakni pandangan tentang kehormatan atau prestise yang diberikan oleh latar belakang keluarga, aktivitas pekerjaan, atau bentuk-bentuk konsumsi. Selanjutnya, dimensi ketiga yang dikemukakan Weber adalah kekuasaan yang secara eksplisit menunjuk pada hak-hak politik sumber-sumber penghasilan. Konsep Weber tersebut dapat digunakan dalam melihat keberadaan perempuan. Misalnya, seorang perempuan, yang karena jenis kelaminnya, ditempatkan pada status yang rendah, dan ia hanya memiliki sedikit sumber daya ekonomi atau hak politik. Namun, pekerjaannya sebagai perawat mungkin memberikan kepadanya suatu status kehormatan tertentu di dalam masyarakat yang menghargai pekerjaan pengasuhan, yakni peran-peran keperawatan. (Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 2002; 9)

Di sisi lain, analisis konflik menawarkan penjelasan yang baik tentang mengapa ketidaksetaraan seksual masih terjadi hingga hari ini. Menurut teoretisi konflik, ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk lain dari stratifikasi sosial. Perempuan umumnya memiliki status-sosial lebih rendah dari pria yang berada pada posisi yang sama. Artinya, seorang perempuan kelas atas mungkin memiliki status lebih unggul daripada seorang perempuan kelas bawah, tetapi dalam banyak hal, dia memiliki status lebih rendah daripada seorang pria kelas atas.

Teori konflik modern berpendapat, bahwa laki-laki dapat menikmati status yang unggul hanya jika perempuan memiliki status lebih rendah, dan pola peran gender yang ada memungkinkan mereka untuk mempertahankan hak-hak istimewa politik, sosial, dan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa ada konspirasi sadar yang disengaja oleh manusia untuk mempertahankan ketidaksetaraan yang berlaku. Ini hanya berarti bahwa keuntungan kelompok dominan dari perjanjian yang telah ada memiliki sedikit motivasi untuk mengubahnya, karena pengaturan budaya masyarakat apapun selalu mencerminkan kepentingan kelompok dominan, dan peran gender terus memperkuat pola dominasi laki-laki.

Dalam pandangan teori konflik, bahwa sumber yang mendasari ketidaksetaraan seksual adalah kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Kekayaan merupakan sumber utama status sosial. Dengan kekayaan, seseorang dapat mencapai kekuasaan dan prestise. Ini berarti, bahwa jika manusia memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar pada keluarga dan masyarakat daripada perempuan, maka laki-laki cenderung memiliki status sosial unggul dalam keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, jika kontribusi ekonomi perempuan relatif meningkat terhadap laki-laki, maka kesenjangan antara kedua jenis kelamin harus berkurang. (Ian Robertson, 1988; 319)

3. Laki-laki, Perempuan, dan Pekerjaan

Pada umumnya, masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria utama dalam pembagian kerja sosial individu-individu. Ada peranan yang dipandang cocok bagi kedua jenis kelamin, dan ada yang hanya dipandang cocok untuk kelamin laki-laki, dan demikian juga sebaliknya. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin itu dapat berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Namun, ada prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tersebut, yaitu bagi kaum pria

adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan fisik yang lebih besar, tingkat resiko dan bahaya yang tinggi, berlevel publik, mengandung tingkat kerjasama yang lebih tinggi, dan lain-lain. Bagi kaum perempuan adalah cocok dengan pekerjaan dengan tingkat resiko kurang berbahaya, cenderung lebih bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi tinggi, dan lain-lain. (Stephen K. Sanderson, 1995; 395)

Sebagaimana di atas, bahwa adanya perbedaan wilayah publik (diperankan oleh laki-laki) dan domestik (diperankan oleh perempuan) berakibat munculnya pemahaman, bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan adalah sekunder. Pemahaman ini berakibat pada rendahnya pemberian upah pada kaum perempuan. Padahal, perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan adalah inti dari ketidak setaraan. Pendapatan yang tidak merata menunjukkan adanya ketimpangan sosial. Karena, dalam suatu relasi, pasangan dengan pendapatan yang lebih tinggi kemungkinan akan memimpin mitranya yang berpenghasilan lebih rendah, dan sekaligus mitra tersebut menjadi pihak tergantung. Ini melembaga dalam keyakinan sosial sebagaimana pepatah kuno, "ia yang bertanggung jawab menentukan apa yang harus terjadi". (Ian Roberston, 1988; 328)

Terlepas dari kenyataan, bahwa sejumlah besar perempuan telah mengambil pekerjaan di luar rumah, *gap* yang signifikan telah berlangsung dalam pendapatan pekerja laki-laki dan perempuan penuh-waktu, dengan perempuan umumnya produktif sekitar 60 persen dari apa yang laki-laki sudah dapat. Sejauh ini, tidak ada pekerjaan perempuan yang memperoleh rata-rata sebanyak rata-rata laki-laki, bahkan tidak di dalam pekerjaan (seperti perawatan) di mana perempuan jauh melebihi laki-laki. Bahkan diperkirakan paling optimis, bahwa perbedaan pendapatan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Pada tahun 2000, rata-rata perempuan bisa mendapatkan penghasilan hanya 74 sen untuk setiap dolar yang diterima oleh rata-rata laki-laki. (Ian Robertson, 1988; 328)

Mengapa, ketika perempuan telah membanjiri ke dalam angkatan kerja, kesenjangan dengan laki-laki tetap bertahan? Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah bahwa perempuan, secara keseluruhan, kurang berpendidikan dan pengalaman dalam pekerjaan daripada laki-laki, sehingga ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja kurang terpenuhi. Selain itu, tanggung jawab tradisional perempuan dalam keluarga juga mungkin mempengaruhi karir mereka, misalnya, ketika hamil dan membesarkan anak, maka menyebabkan mereka keluar dari pasar tenaga kerja dalam jangka waktu yang lama. Disamping itu, ada bukti kuat, bahwa majikan menganggap perempuan kurang mampu dibandingkan pria, dan tidak mengambil mereka sebagai kandidat serius untuk promosi, kecuali jika mereka tampil sangat baik melebihi laki-laki umumnya. Ironisnya, perempuan menduduki posisi tinggi sangat sedikit; hanya 8 dari setiap 1.000 perempuan bekerja memiliki seorang eksekutif tingkat tinggi, manajerial, atau pekerjaan administratif; Bahkan, ketika pria dan perempuan melakukan pekerjaan yang sama, mereka terkadang memiliki sebutan dan skala pembayaran yang berbeda: kalau laki-laki menjadi "asisten administrasi", maka yang perempuan hanya seorang "sekretaris eksekutif".

Sebagai akibat dari faktor tersebut sebagian besar perempuan pekerja bergaji rendah. Bahkan, sekitar 80 persen dari semua perempuan yang bekerja terkonsentrasi hanya 20 dari 427 kategori pekerjaan besar yang diakui oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Perempuan merupakan 85 persen dari guru sekolah dasar, 86 persen dari pustakawan, 84 persen dari kasir, perawat 96 persen, 97 persen dari resepsionis, 96 persen dari juru ketik, dan 98

persen dari sekretaris.

Konstruksi sosial tentang relasi antara laki-laki dan perempuan serta peran masing-masing telah berkembang sedemikian rupa, sehingga pekerjaan yang dijalani perempuan mendapat upah lebih rendah/sedikit daripada pekerjaan yang didominasi laki-laki; pustakawan mendapatkan gaji lebih sedikit daripada tukang kayu; kasir lebih sedikit daripada kolektor sampah; perawat lebih sedikit dari akuntan, dan seterusnya. Akibatnya, "upah yang sama untuk pekerjaan yang sama" menawarkan sedikit manfaat bagi sebagian besar pekerja perempuan: tidak membantu secara signifikan jika sekretaris laki-laki dibayar sama dengan sekretaris perempuan, ketika sekretaris kebanyakan adalah perempuan dan pekerjaan itu dibayar secara kurang baik. Akibatnya, beberapa orang telah menuntut suatu sistem yang sangat berbeda, yaitu "upah yang sama untuk pekerjaan yang sebanding", dan ini adalah mengandung ide, bahwa setiap pekerjaan dapat diberikan dalam peringkat numerik dari nilai praktis yang pada gilirannya akan digunakan untuk membandingkan nilai intrinsik dari pekerjaan yang berbeda dan untuk menetapkan gaji yang sesuai.

Pemerintah federal dan pengusaha umumnya tidak sepakat dengan saran "pembayaran sebanding" itu. Mereka mengklaim, bahwa membandingkan pekerjaan yang berbeda adalah seperti membandingkan apel dan jeruk, bahwa usulan tersebut akan menyebabkan kenaikan upah dan kenaikan harga, dan juga dapat mendorong pengusaha untuk mempekerjakan laki-laki bukan perempuan. Hal itu menunjukkan betapa sulitnya mengurangi *gap* income atau kesenjangan nilai ekonomi antara laki-laki dan perempuan di masa sekarang.

Sekelompok kecil dari kaum perempuan telah memasuki pekerjaan yang bersifat profesi. Perempuan sekarang mewakili 6 persen dari insinyur, 16 persen dari dokter, 11 persen dari arsitek, 6 persen dari dokter gigi, 16 persen dari pengacara dan hakim, 30 persen dari ilmuwan komputer, 41 persen dari akuntan, dan 37 persen guru di perguruan tinggi. Perempuan sering mengalami masalah dalam kenaikan karir ke jenjang yang tinggi. Perempuan mungkin dipromosikan sampai titik tertentu, dan mendapat keuntungan yang mengesankan di tingkat awal dan manajemen menengah. Namun, selanjutnya mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat tinggi. Dari 500 perusahaan terkemuka, hanya dua yang memiliki kepala eksekutif perempuan, dan satu dari mereka mewarisi kendali perusahaan dari ayahnya. Tidak ada satu perusahaan pun memiliki eksekutif perempuan dengan "jalur cepat". Pola ini diulang di seluruh sektor ekonomi; perempuan mungkin mencapai 44 persen dari angkatan kerja, tetapi kurang dari 5 persen menjadi eksekutif senior; mereka mungkin 71 persen dari guru ruang kelas, tetapi mereka hanya 2 persen menjadi pengawas sekolah; mereka mungkin lebih dari setengah populasi, tetapi hanya sekitar 400 dari 16.000 yang menduduki kursi di dewan perusahaan terkemuka milik bangsa tersebut. (Ian Robertson, 1988; 329)

Mengapa perempuan sulit untuk mencapai karir sampai tingkat atas? Salah satu alasannya, tidak diragukan lagi, adalah sikap paradigmatis banyak orang yang subordinatif tentang perempuan. Kepemimpinan perusahaan di Amerika, misalnya, adalah semacam jaringan anak laki-laki tua, tidak ada jaringan anak perempuan tua untuk berbicara tentang hal itu. Masih banyak pria yang merasa lebih pas kalau perempuan harus di rumah, atau di tempat tidur, atau memiliki bayi daripada bekerja. Dalam suasana persahabatan, laki-laki sering bersahaja, kombinasi kompetensi perempuan dan daya tarik seksual dapat mengganggu dan bahkan mengancam. Alasan lain yang mungkin adalah bahwa proses sosialisasi cenderung menghasilkan

perempuan yang kurang percaya diri dan tekad untuk menyelesaikan dengan laki-laki untuk tujuan karir. Seperti diketahui, bahwa perempuan diajarkan sejak kecil bersikap baik, untuk mengalah kepada laki-laki, untuk mendengarkan mereka tanpa mengganggu/menyela, untuk bersikap suportif daripada kompetitif. Perempuan yang naik ke tingkat atas cenderung mereka yang telah belajar untuk berperilaku dalam beberapa hal dengan cara yang "maskulin" dan tegas, karena ini adalah gaya yang mengerti dunia usaha. (Ian Robertson, 1988; 330)

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara tahun 2000 menjelaskan kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah di Indonesia, bahwa dari total 3.946.000 itu terdiri dari 1.485.000 perempuan dan 2.461.000 laki-laki. Prestasi kerja perempuan birokrat dilihat dari posisi jabatan struktural adalah sebagai berikut, bahwa dalam buku "Wanita dan Pria di Indonesia 2000" oleh BPS, perempuan PNS yang menduduki jabatan struktural atau eselon adalah sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Dari setiap 25 pejabat eselon I dan II, satu di antaranya adalah perempuan (artinya: rasio laki-laki dan perempuan adalah 25;1). Dari setiap 13 pejabat eselon III, satu di antaranya adalah perempuan (rasio laki-laki dan perempuan adalah 13;1). Dari setiap 7 pejabat eselon IV, satu di antaranya adalah perempuan, dan dari setiap 6 pejabat eselon 5, satu di antaranya yaitu perempuan. Sedangkan kesenjangan jumlah perempuan dalam birokrasi masih tampak jelas, dan hal ini sebagaimana data dari Badan Kepegawaian Negara bulan Maret tahun 2003, bahwa perbandingan prosentase antara PNS laki-laki dan perempuan golongan III adalah 56,7 dan 43,3. Untuk golongan IV perbandingannya adalah 63,3 dan 36,8. Adapun perbandingan prosentase PNS laki-laki dan perempuan eselon III adalah 86,7 dan 13,3, untuk eselon II adalah 93,5 dan 6,5 dan untuk eselon I adalah antara 90 dan 10. (Sulistiyowati Irianto, 2006; 463)

Demikian juga di lingkungan perguruan tinggi Islam di Indonesia (IAIN, STAIN, dan UIN), bahwa belum pernah ada pemimpin tertinggi (Rektor) yang dijabat oleh perempuan.

Penutup

Upaya kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan ekonomi (baca: nilai tenaga dan atau/upah kerja) dengan kaum laki-laki tampaknya masih memerlukan sejarah panjang dan bersifat evolusif, sebagaimana upaya itu telah berjalan sangat lama. Upaya itu dimulai dari gerakan yang bercorak feminisme hingga gerakan gender. Gerakan feminisme berfokus pada upaya menyetarakan kedudukan antara laki dan perempuan dalam setiap lini kehidupan. Sedangkan gerakan gender memusatkan perhatian pada upaya konstruksi imajinatif yang seimbang antara laki dan perempuan, sehingga tidak ada lagi dijumpai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan posisi sosial dan ekonomi antara laki dan perempuan. Semua upaya itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara kedua jenis manusia tersebut.

Namun yang terjadi berdasarkan paparan di atas bahwa kesenjangan itu masih sulit dihindari, terutama dalam bidang penghasilan ekonomi atau yang dikenal dengan upah kerja. Bahwa dalam kedudukan, jabatan, dan jenis kerja yang sama, perempuan lebih dinilai rendah sehingga mendapat gaji lebih rendah dibanding dengan lelaki yang menduduki posisi sama. Ini semua terjadi secara konkret terutama di luar pekerjaan negeri/ pemerintah, dan sangat sulit untuk dinetralkan. Ternyata faktornya adalah bersifat gender, yaitu karena perempuan diasumsikan sebagai pelengkap; kehadirannya sebagai manusia rumahan (domestik); kehadirannya sebagai perusak stabilitas konsentrasi lantaran kecantikan yang ditampilkannya

di depan kaum laki; dan sejenisnya. Padahal semua itu adalah konstruksi sosial-budaya yang tentunya masih sangat mungkin direkonstruksi walaupun tentu dengan perjuangan yang lebih intens lagi.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perjuangan gender, sebagai pelengkap atau tindak lanjut dari perjuangan feminisme, masih terus harus diperjuangkan dalam rangka membangun kemitraan dan kesetaraan relasional antara laki-laki dan perempuan, terutama untuk mendapatkan status ekonomi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ekonomi, dalam arti perbedaan kerja berdasarkan jenis kelamin pelaku, sungguh merupakan inti dari ketidaksetaraan gender yang juga mengindikasikan belum berhasilnya secara tuntas cita-cita feminisme dan gerakan gender itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Din Wahid dan Jamhari Makruf. *Agama Politik Global dan Hak-hak perempuan* 2007. Jakarta: PPIM UIN Jakarta bekerjasama dengan British Embassy.
- Fauzie Ridjal. dkk (editor). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. 1993. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Ian Robertson. *Sociology*. Third Edition. 1988. New York: Worth Publisher.
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore. *Sosiologi Wanita*. terj. Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana. 2002. Jakarta: Rineka Cipta.
- Julia Cleves Mosse. *Gender dan Pembangunan*. 2004. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar.
- Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 1997. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah Ch. *Paradigma Gender*. 2004. Malang: Bayu Media.
- Soenyono. *Teori-teori Gerakan Sosial*. 2005. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Stephen K. Sanderson. *Sosiologi Makro: sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. terj. Farid Wajidi dan S. Menno. 1995. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati Irianto (editor). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. 2006. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tim PSW UIN Syarif Hidayatullah. *Pengantar Kajian Gender*. 2003. Jakarta:PSW UIN Jakarta bekerjasama dengan IISEP.